

Kajian Penanggulangan Kemiskinan dari Perspektif Gender di Kabupaten Tuban

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah umum dalam pembangunan. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS) tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Tuban mencapai 15,91%, sedangkan pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Tuban hanya sebesar 14,58 %. Artinya ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,33 % di tahun 2020. Yang faktor utama penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang sangat memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat. Kabupaten Tuban adalah salah satu daerah dengan kondisi UMKM yang potensial. Jumlah UMKM berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban terdapat 70.772 unit. UMKM yang ada di Kabupaten Tuban memiliki empat belas sektor. Terdapat tiga sektor utama yaitu makanan dan minuman sebanyak 20.764 unit (29,35%), perdagangan berjumlah 16.529 unit (23,35%), dan toko kelontong sejumlah 13.488 unit (19,06%). Perempuan, sebagai kelompok rentan, memiliki keterbatasan akses pada bidang ekonomi dibandingkan dengan laki-laki. Para wirausaha perempuan sebagian besar merupakan penopang utama roda perekonomian keluarga. Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka menurunkan angka kemiskinan adalah dengan melakukan kajian penanggulangan kemiskinan dari perspektif gender di Kabupaten Tuban. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran persoalan sekaligus menemukan solusi alternatif berupa strategi menurunkan angka kemiskinan melalui partisipasi aktif perempuan di Kabupaten Tuban untuk menuju Tuban sejahtera. Kajian ini menggunakan mixed methods, yaitu mengelaborasi data kualitatif dan kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan usaha yang dimiliki oleh perempuan di Kabupaten Tuban (pelaku UMKM) sebagian besar adalah usaha mikro dengan skala penjualan lokal dan belum mampu menyerap banyak tenaga kerja. Omzet per bulannya 90,76 % sangat kecil; 4,20 % kisaran 10-20 juta rupiah; 2,52 % kisaran 20-30 juta rupiah; 1,68 % kisaran 20-40 juta rupiah dan 0,84 % mencapai 40-50 juta rupiah. Hal tersebut dikarenakan program pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya menerapkan pengarusutamaan gender. Rekomendasi yang diberikan adalah pengembangan UMKM hendaknya dilakukan dengan melihat potensi dan asset yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, dalam rangka percepatan pengembangan UMKM agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban menyusun kebijakan sebagaimana berikut: 1) Membuat Rencana Strategis Jangka Panjang dan Jangka Menengah Pembangunan UMKM; 2) Memberi fasilitas pengurusan PIRT agar produk bisa dipasarkan secara legal; 3) Memberikan ruang pameran yang memadai; 4) Memberikan pinjaman modal secara porposional; 5) Memberikan pelatihan peningkatan SDM; 6) Memberikan pelatihan manajemen usaha dan pemasaran online; 7) Memberikan fasilitas pembentukan organisasi untuk pemasaran.

Kata kunci: pengarusutamaan gender, kemiskinan, UMKM, partisipasi perempuan